BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Pemekaran Kabupaten Pangandaran berlandaskan Undang-undang nomor 21 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

Fenomena keinginan berpisahnya satu daerah untuk membentuk daerah otonomi sendiri melalui mekanisme pemekaran wilayah yang sudah di rencanakan secara top down maupun melalui usulan warganya saat ini menunjukkan keinginan masyarakat wilayah tersebut untuk memperoleh *benefit* yang lebih besar dari proses pembangunan disamping kendala-kendala yang terjadi secara administrasi karena jauhnya letak geografis wilayah tersebut dari pusat kekuasaan Provinsi/Kabupaten, kurangnya pelayanan publik dan lainnya.

Hal tersebut akan berimplikasi pada berbagai hal disamping dampak yang nyata bagi Provinsi/Kabupaten seperti berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah), inventarisasi asset Pemda yang rumit, biaya tambahan saat proses peralihan juga masalah tata kepegawaian yang harus disolusikan. Hal yang cukup untuk mendapat perhatian dari pemekaran wilayah adalah kurangnya SDM yang berkualitas dari daerah yang baru dimekarkan karena adanya keinginan dari setiap daerah tersebut agar putra daerahnya yang memimpin dan mengelola roda pemerintahan. Keinginan percepatan pemekaran Pangandaran menjadi Kabupaten baru ini, putra daerahnya/masyarakatnya sudah siap segalanya, termasuk risiko apa pun yang terjadi dalam mengelola setelah menjadi Kabupaten. Atas dasar penelitian-penelitian, aspek geografisnya, atau pariwisata, merupakan potensi-potensi yang kuat, yang sangat diandalkan. Beberapa tokoh yang menjadi inspirator dalam pemekaran Kabupaten Pangandaran adalah Jeje Wiradinata dimana saat ini sebagai Wakil Bupati Ciamis. Jeje mengungkapkan kesimpulan hasil kajian tim kecil yang secara khusus meneliti persoalan perkembangan perekonomian di wilayah yang sebelumnya menghendaki pemekaran. Sementara itu, Adang selaku presidium pemekaran Ciamis, memiliki peran penting dalam mewujudkan pemekaran Kabupaten Pangandaran, tak lepas dari peran Adang ada juga tokoh-tokoh presidium yang dianggap penting pada saat itu seperti Alm. H. Iyos dan H. Supratman, ketiga tokoh tersebut yang dianggap paling besar jasanya oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari pemekaran Kabupaten Pangandaran sendiri ialah, Ketiga tokoh tersebut ingin melihat Pangandaran sebagai Kabupaten yang maju serta Sumber Daya Manusianya diperhatikan, infrastruktur di Kabupaten Pangandaran yang selama ini kurang di Perhatikan oleh pusat menjadi lebih baik lagi

dan ketiga tokoh tersebut ingin Sumber Daya Alam Kabupaten Pangandaran di Kelola oleh Putra daerah karna Pangandaran memiliki salah satu objek wisata unggulan yang indah yaitu pantai Pangandaran.

Pemekaran tersebut sebagai wujud desentralisasi sebagai otonomi kedaerahan dan demokrasi, selain itu membuat tata pemerintahan menjadi lebih transparan. Dampak dari desentralisasi adalah membuat berbagai daerah berlomba-lomba untuk melakukan pemekaran yang membuat gairah politik lokal menjadi tumbuh dan memunculkan berbagai kontestasi lokal yang menarik dan memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk menjadi dan menentukan pilihan pemimpin daerahnya.¹

Pilkada merupakan sarana legal untuk pergantian kekuasaan. Disamping bertujuan untuk pergantian kekuasaan, Pemilu juga bermanfaat sebagai ruang evaluasi atas kepemimpinan lima tahunan oleh masyarakat. Pemilu dalam tataran praksisnya adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut mulai dari presiden, gubernur, Bupati/walikota serta wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.

Pilkada secara langsung dilaksanakan berdasarkan keputusan politik UU nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Daerah secara langsung². Pilkada secara langsung merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas Demokrasi di daerah.

¹ Henk Schulte Nordholt dkk, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 1.

² UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Gagasan utama dari Pilkada memang ideal, dimana rakyat di tingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri pimpinan daerahnya.³

Pada perkembangan berikutnya sebagaimana diintroduksi dalam UU no. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur adanya calon perseorangan (dikenal dengan calon independent) dapat ikut dalam Pilkada setelah melalui proses persyaratan tertentu.

Selain itu, pilkada juga merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter dalam Gustiana A.Kambo dkk. (2016:1) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem *elite vote* ke *popular vote*. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling sering terjadi adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Kedudukan kepala daerah

³ Wahidin Samsul, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008; Hal 28

sebelumnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Salah satu contoh *real* dampak desentralisasi yaitu yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan tiga pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran di kantor KPU Pangandaran, Senin, 24 Agustus 2015. Penetapan pasangan ini sesuai rapat pleno yang tertuang dalam berita acara nomor 55/BA/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Ciamis Nomor 85/Kpts/KPU-Kab.011.329084.1/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2015.

Sebelum terpilihnya bupati melalui Pilkada pada tahun 2015. Kabupaten Pangandaran sejak berdirinya telah dipimpin oleh Pejabat Bupati sementara yaitu Endjang Naffandy masa periode aktif tahun 2013-2015, dilanjutkan oleh Daud Achmad masa periode aktif tahun 2015-2016.

Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 merupakan pilkada yang pertama kali dilangsungkan di Kabupaten Pangandaran yang baru dimekarkan dari Kabupaten Ciamis tahun 2013. Pilkada tersebut diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yaitu Pasangan H. Ino Darsono – Erwin Thamrin, pasangan Hj. Azizah Talita Dewi – Sulaksana dan pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari. Untuk lebih jelasnya mengenai perolehan suara dari ketiga calon tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

No	Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	H.Ino Darsono – Erwin Thamrin	75. 778	31. 64
2	Hj.Azizah Talita Dewi– Sulaksana	23. 216	9. 69
3	H.Jeje Wiradinata – H.Adang Hadari	140. 481	58, 66

Sumber: KPU Kab. Pangandaran,2015

Melihat dari tabel diatas, dalam kontestasi politik tersebut Pasangan Pasangan meraih suara, Pasangan meraih suara dan Pasangan meraih suara. Berdasarkan raihan suara tersebut, Pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari memenangkan perolehan suara sebanyak dari total suara sah dan sebagai pemenang kontestasi pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. ⁴

Berhasilnya raihan suara yang lebih dari 50% pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 yang diselenggarakan dalam 1 (satu) putaran menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang untuk menjadi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pangandaran. Berhasilnya pasangan ini meraih suara secara signifikan dalam Pilkada Pangandaran salah satunya penerapan *marketing* politik yang jitu.

Marketing politik yang diterapkan pada kemenangan pasangan Jeje-Adang adalah *Pass marketing*. Dimana tim suksesnya menerapkan strategi *Pass marketing*

⁴KPU Kabupaten Pangandaran,2016.

guna memenangkan pilkada di Pangandaran, Menurut Firmansyah⁵ menyebutkan bahwa *Pass Marketing* dalam konstasi politik ini lebih menekankan pada penyampaian produk politik kepada individu/kelompok atau pihak yang memiliki pengaruh kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. Berbagai pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat memiliki nilai strategis bagi kandidat, sebab dengan adanya daya pengaruh, para tokoh tersebut dapat meneruskan pesan-pesan politik yang disampaikan kandidat kepada masyarakat atau komunitasnya.

Individu/kelompok yang dimaksud dalam kemenangan Bupati Jeje-Adang ini merupakan individu yang berpengaruh dalam mengubah opini masyarakat, hal ini disebabkan karena orang yang berpengaruh tersebut memiliki pemanfaatan modal sosial serta perandalam konteks Pilkada di Pangandaran dalam membangun komunikasi dan dapat mempengaruhi masyarakat di wilayahnya.

Penelitian yang dilakukan Zainal (2015) mengemukakan bahwa Pengaruh *Local Strongman* mengantarkan Aras Tammauni dan Muh.Amin Jasa pada kemenangan Pilkada Mamuju Tengah. Eksistensi Aras Tammauni sebagai *Local Strongman* ditandai dengan berhasilnya Aras Tammauni membentuk jaringan, berupa jaringan keluarga dan jaringan dengan masyarakat yang terbentuk atas patron-klien. Aras Tammauni melakukan kontrol sosial baik pada ranah politik dan kepemilikan tanah, serta yang kuasa Aras Tammauni terhadap alokasi lembaga dan Sumber Daya Negara. Dengan melekatnya ketiga indikator tersebut maka semakin

⁵Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

tepat bahwa Aras Tammauni adalah *Local Strongman* yang berpengaruh besar terhadap kemenangannya dan wakilnya yakni pak Muh.Amin Jasa.⁶

Orang yang berpengaruh dalam penerapan *Pass Marketing* dalam penelitian ini dapat disebut sebagai aktor lokal yang memiliki kekuatan dan mempunyai peran yang luar biasa dalam kemenangan calon bupati Pangandaran 2015 yaitu Jeje dan Adang. Dimana *Local Strongman* tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda maupun asal kecamatan yang merupakan basis suara terbanyak diantara kecamatan yang lain, aktor juga dipandang merupakan sosok yang sangat dihormati dan dihargai di kecamatannya.

Sebagai aktor dalam kemenangan bupati terpilih tersebut. *Local Strongman* di masyarakat ini keberadaannya berada di luar struktur kekuasaan dan tidak termasuk pada Tim Sukses, namun memiliki modal kapital maupun religi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Modal yang dimiliki oleh *Local strongman* tersebut adalah modal sosial dan kepentingan - kepentingan rakyat akar rumput.

Keberadaan *Local Strongman* di Kabupaten Pangandaran tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat karena mereka dapat diposisikan sebagai *opinion leader*. Dalam masyarakat Pangandaran *opinion leader* seperti memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk komunikasi yang

⁶Zainal. 2017. *Local strongmen* dan kontestasi politik (studi terhadap kemenangan fenomenal Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah.Sulesana Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017

dilakukan oleh *Local Strongman* tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Kajian tentang *Local Strongman* dalam kontestasi politik lokal yang penting untuk diketahui dalam hal ini adalah upaya calon Bupati Jeje-Adang terpilih dalam melakukan kampanye persuasif di masyarakat dan membangun sinergi dengan *Local Strongman*. Sebab jika berkaca pada hasil Pilkada Pangandaran yang begitu fenomena dengan melakukan strategi *Pass Marketing*. Strategi *Pass Marketing* tersebut merupakan penyampaian produk politik kepada *influencer group* atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat. Berbagai pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat memiliki nilai strategis bagi kandidat, sebab dengan adanya daya pengaruh, *Local Strongman* tersebut dapat meneruskan pesan-pesan politik yang disampaikan kandidat kepada masyarakat atau komunitasnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang yang di uraikan penulis diatas yaitu: “Bagaimana strategi *Pass Marketing* Peran *Local Strongman* pada kemenangan Pasangan Calon Bupati Jeje Wiradinata dan Adang Hadari Dalam Pilkada Pangandaran Tahun 2015?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini di maksudkan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi *Pass*

Marketing peran *Local strongman* pada kemenangan pasangan Calon Bupati Jeje Wiradinata dan Adang Hadari Dalam Pilkada Pangandaran Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, yaitu:

1. Manfaat Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu politik, terkhusus tentang kekuatan politik lokal sebagai bahan untuk kajian yang lebih lanjut.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya yang juga akan meneliti tentang aktor dalam pemenangan pilkada atau mengenai kekuatan-kekuatan politik lokal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah, partai-partai politik serta elit- elit politik lokal dalam membuat dan menyusun kebijakan pemerintah serta strategi partai politik.
 - b. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang kekuatan politik lokal dalam pemilihan kepala daerah.